

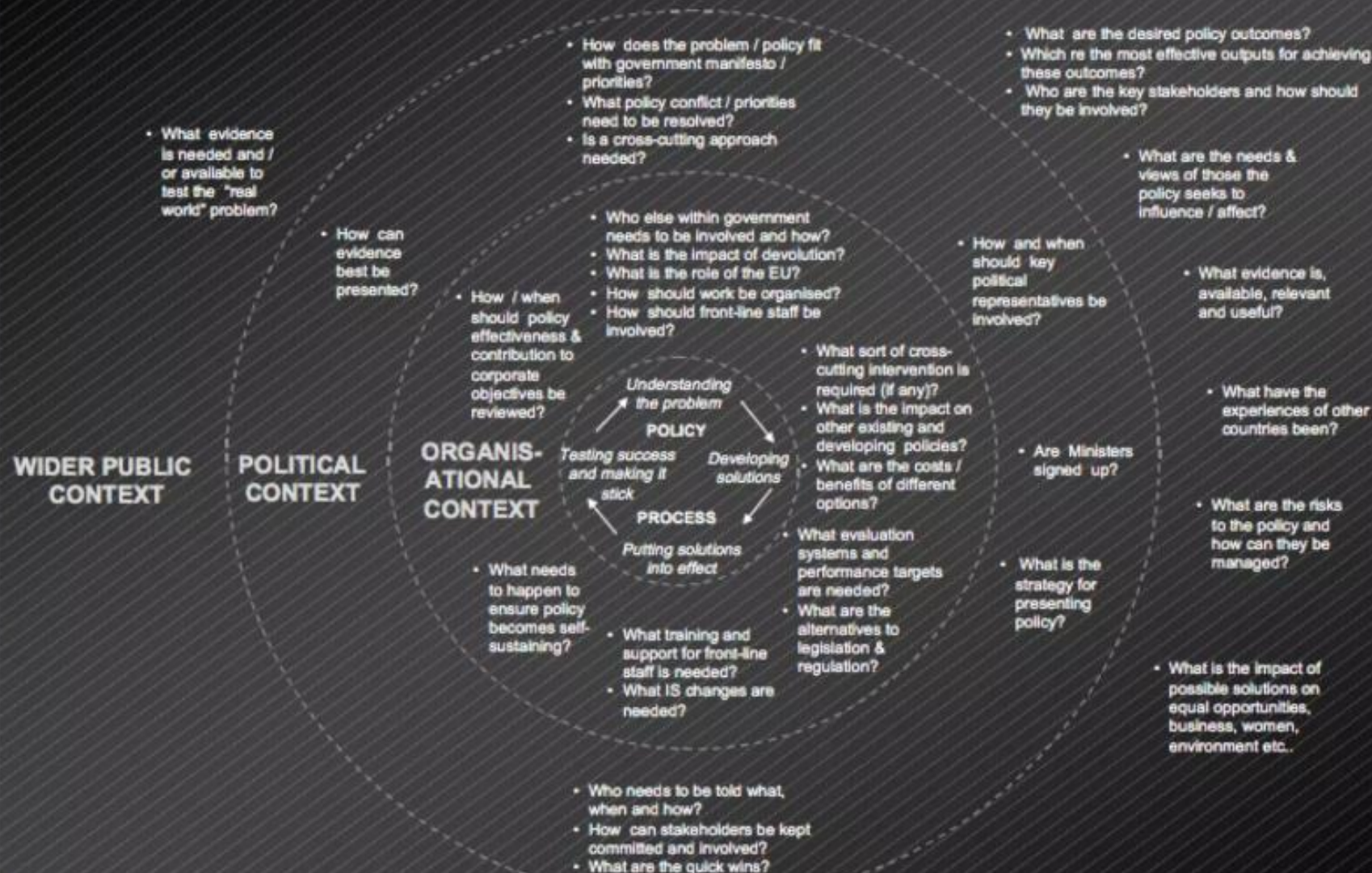
PENERAPAN *EVIDENCE-BASED POLICY MAKING* & KAITANNYA DENGAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN

Prolog: Sejarah EBP

 Save slide

- Terdapat proposisi bahwa pengetahuan yang handal adalah instrumen untuk mewujudkan kebijakan yang berkualitas. Ilmu sosial (ekonomi, sosiologi, politik, psikologi dll) berkembang pesat dan ilmuwan sosial terlibat dalam berbagai aktivitas reformasi kebijakan.
- Namun, hasilnya masih belum optimal karena penelitian sosial yang tidak memadai, serta kapasitas implementasi dan koordinasi yang buruk dari lembaga pemerintah. Itulah sebabnya, penggunaan data kuantitatif dan metode eksperimental sangat dianjurkan sebagai sarana untuk memberikan bukti (*evidence*) yang lebih tepat dan andal bagi para pembuat keputusan.

The policy process in context



Saya ingin mengakhiri mengambil kebijakan yang berwarna ideologi.

Kebijakan publik dibawah pemerintahan saya haruslah yang problem solving. Ia harus evidence-based policy. Ia harus kebijakan yang berdasar pada bukti, pada data, dan pada riset.

Saya meyakini, kebijakan publik akan lebih melayani kepentingan masyarakat jika ia bersandar pada prosedur ilmiah, bukan giringan ideologi.

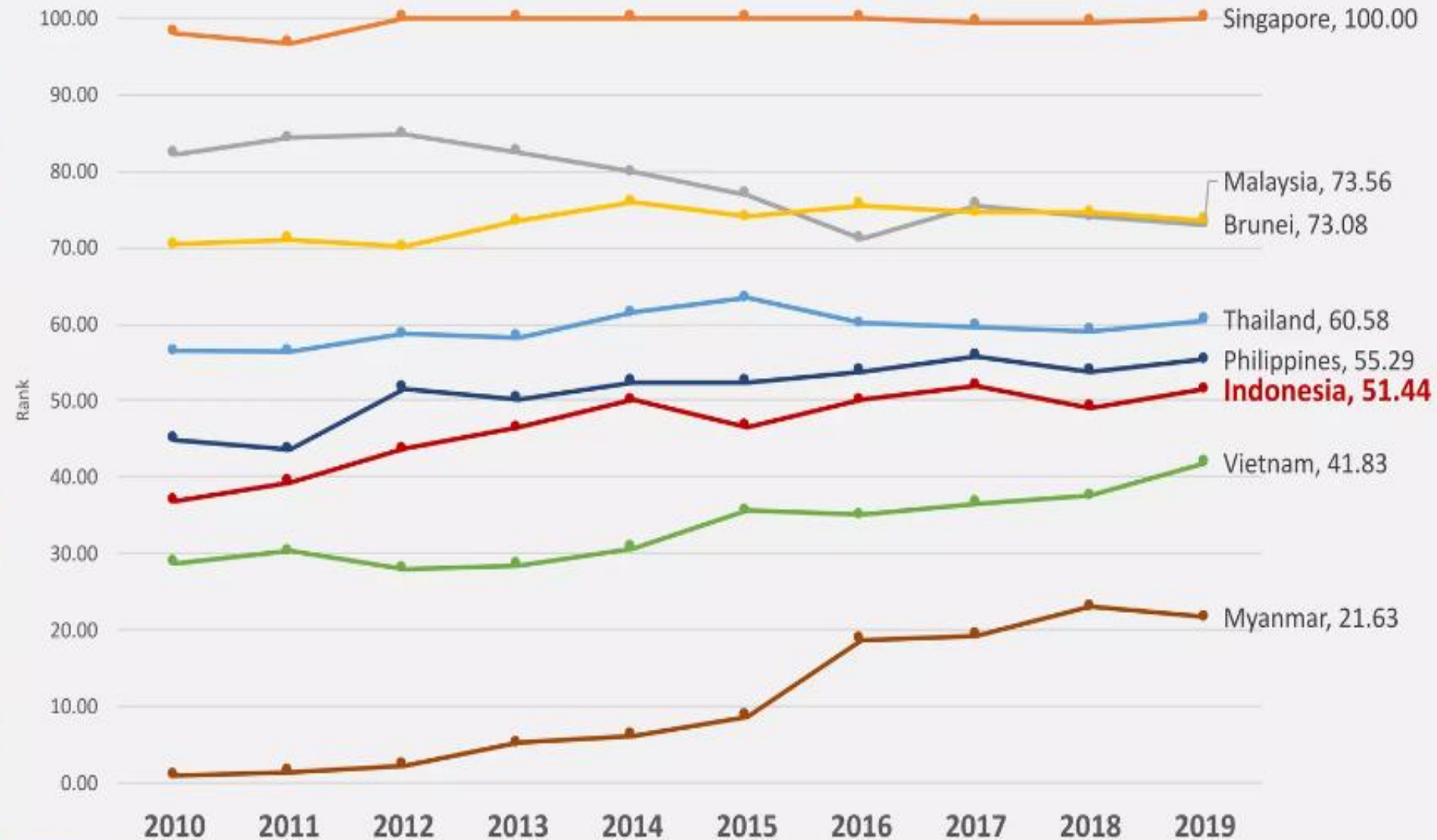
Tony Blair (PM Inggris, 2 Mei 1997 – 27 Juni 2007)

Sumber: UK Cabinet Office, 1999, Professional policy making for the twenty first century. London.

Worldwide Governance Indicators

REGULATORY QUALITY

Percentile rank countries (ranges from 0 (lowest) to 100 (highest) rank)



WGI:

- 1) Voice and Accountability;
- 2) Political Stability and Absence of Violence;
- 3) Government Effectiveness;
- 4) **Regulatory Quality;**
- 5) Rule of Law;
- 6) Control of Corruption

Latar Belakang IKK

Kualitas kebijakan masih kurang baik, tumpang-tindih, tidak berpihak pada publik, minim bukti (tidak *evidence-based*).

2005-2015 terdapat 41.223 regulasi di pusat & daerah berpotensi tumpang tindih (Bappenas, 2015).
Pembatalan menyelesaikan masalah?
Perlu perbaikan dari hulu s.d hilir kebijakan!

IKK

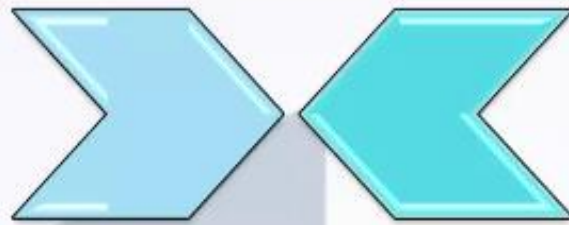
IKK telah diadopsi sebagai salah satu indeks pengukuran capaian RB 2020-2024 oleh Kementerian PAN-RB sesuai PermenPAN-RB No. 25/2020

Kegiatan Level Mikro RB 2020-2024 dengan kegiatan: (a) perencanaan kebijakan yang meliputi agenda setting & formulasi kebijakan; (b) evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah disusun



Gap Between Knowledge & Policy, dan Urgensi EBP

Knowledge
(Research)



Policy

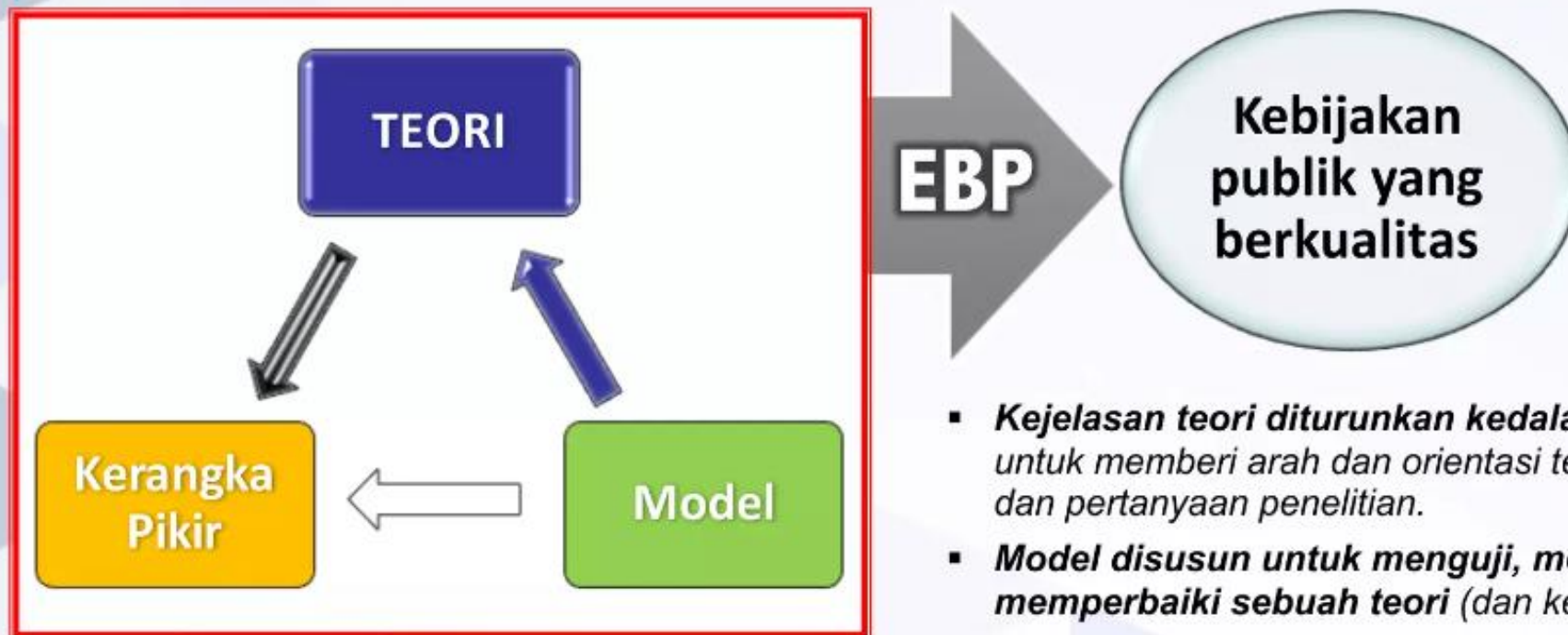
- Keengganan pengambil kebijakan menggunakan hasil penelitian kebijakan;
- Pelaku kebijakan tidak cukup memiliki kapasitas dan idealisme melakukan reformasi kebijakan;

EBP

- Peneliti kebijakan tidak mengerti detail persoalan di lapangan, serta gagal menangkap komplikasi realitas politik mikro & prosedur administrasi yang renik;
- Hasil kajian para peneliti kebijakan terlalu akademis, normatif, dan abstrak.



EBP sebagai Esensi *Policy Analysis*



Rendahnya kualitas kebijakan adalah cermin dari dangkalnya aspek teoretis yang digunakan dalam analisis kebijakan publik

Sumber: Fadillah Putra & Anwar Sanusi (2019)

- *Kejelasan teori diturunkan kedalam Kerangka Pikir, untuk memberi arah dan orientasi terhadap analisis dan pertanyaan penelitian.*
- *Model disusun untuk menguji, mengoreksi, dan memperbaiki sebuah teori (dan kerangka pikir).*
- Maknanya, sebuah kebijakan yang baik tidak mungkin bisa diwujudkan tanpa memiliki akar teori yang kuat. Namun, teori saja sangat tidak cukup. Ia harus direkonstruksi dalam sebuah Kerangka Pikir agar dapat bekerja (*workability*).

EBP: Mengubah Interaksi Pengetahuan-Kebijakan



"You are completely free to carry out whatever research you want, so long as you come to these conclusions."

Power speaks
to truth

(Alison Shaw, 2005)

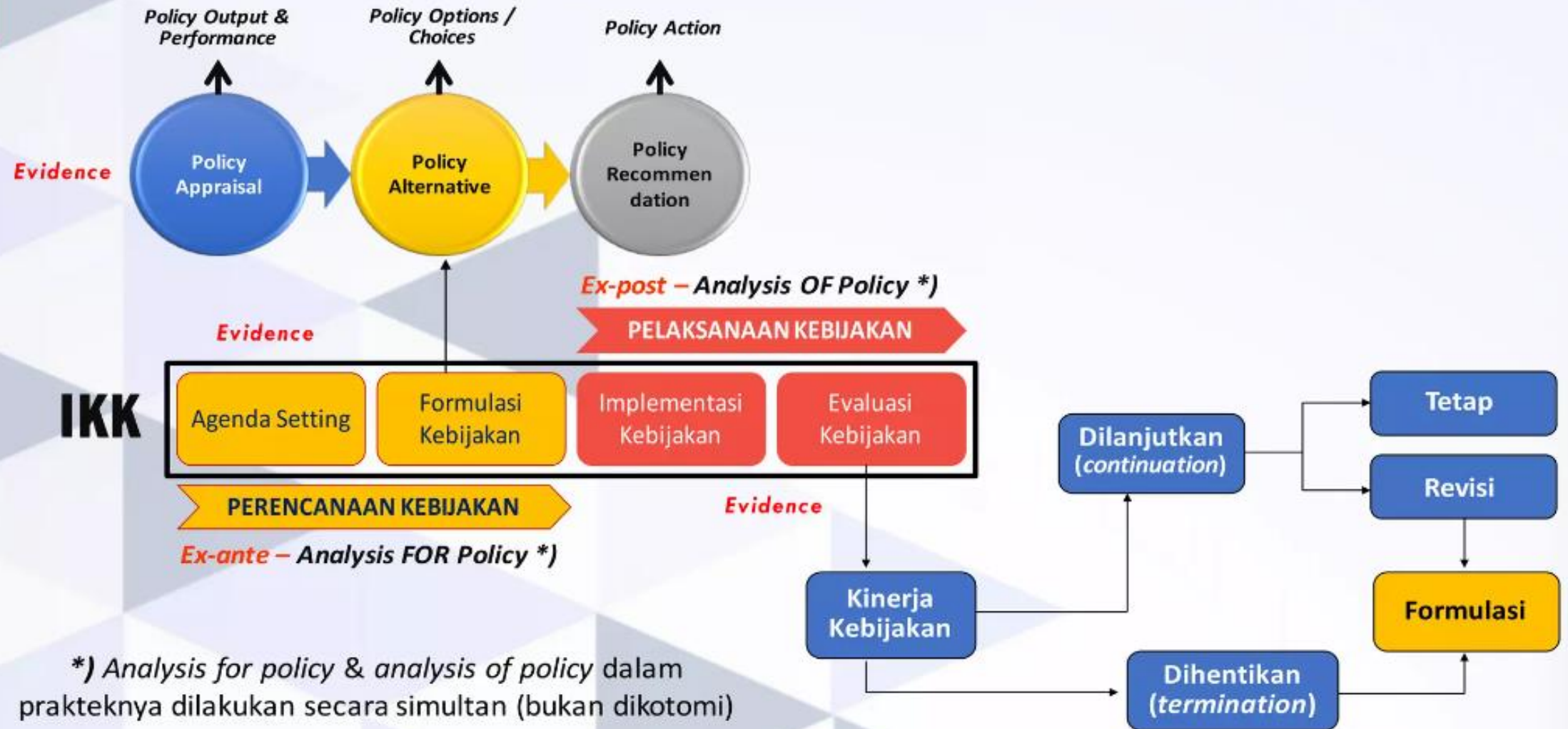


Truth speaks
to power

(Price, 1965)



EBP & Keterkaitannya dengan IKK



IKK dan Indeks RB



IKK sebagai indikator pengukuran capaian Reformasi Birokrasi Nasional pada tataran meso **pada sasaran Birokrasi yang Kapabel**, sesuai PermenPAN 25/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 dengan target Persentase kementerian/lembaga/pemda dengan IKK baik sebesar 100% pada tahun 2024

**Kegiatan Level Mikro Reformasi Birokrasi 2020-2024
pada Program/Area Perubahan:
Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan**

Indeks Reformasi Hukum

- Melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi lingkup instansi pemerintah (menghilangkan overlapping peraturan);
- Deregulasi aturan yang menghambat birokrasi;
- Penguatan sistem regulasi nasional lingkup instansi pemerintah;

Indeks Kualitas Kebijakan

- Melakukan perencanaan kebijakan yang meliputi agenda setting dan formulasi kebijakan;
- Melakukan evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah disusun

Framework IKK



IKK

PERENCANAAN KEBIJAKAN

PELAKSANAAN KEBIJAKAN

Agenda Setting

Formulasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan

Evaluasi Kebijakan

IKK adalah instrumen untuk menilai kualitas kebijakan pemerintah dilihat dari proses pembuatan kebijakan dan bagaimana melakukan pengaturan agenda, formulasi dan implementasi, serta melakukan evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah disusun

Pengukuran agenda setting kebijakan terhadap proses **identifikasi masalah kebijakan, analisis masalah kebijakan, dan partisipasi publik** dalam perumusan kebijakan.

Pengukuran formulasi kebijakan dengan melihat pada **proses pengambilan keputusan kebijakan** berdasarkan beberapa kriteria yang terukur.

Pengukuran implementasi kebijakan dengan berfokus pada **dimensi pengorganisasian, komunikasi kebijakan dan monitoring kebijakan.**

Pengukuran evaluasi kebijakan dengan melihat pada **efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan, penerimaan dan responsivitas** kebijakan.

Dimensi IKK

60 FORMULASI KEBIJAKAN

- a. Berorientasi ke depan
- b. Outward Looking
- c. Berbasis data
- d. Inovatif
- e. Compliance

40 AGENDA SETTING

- a. Identifikasi Masalah
- b. Kajian Terhadap Isu – Isu Aktual
- c. Konsultasi Publik Terhadap Isu dan Assesment yang Dilakukan

50 PERENCANAAN KEBIJAKAN

DIMENSI IKK

50 PELAKSANAAN KEBIJAKAN

60 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

- a. Pengorganisasian
- b. Komunikasi Kebijakan
- c. Pelaksanaan Monitoring

40 EVALUASI KEBIJAKAN

- a. Efektivitas
- b. Efisiensi
- c. Dampak
- d. Kesesuaian nilai

EKSISTING

- a. Berorientasi ke depan
- b. Outward Looking
- c. Berbasis data
- d. Inovatif

- a. Identifikasi dan Validasi Isu
- b. Penyaringan dan Konsultasi Publik terhadap Isu

REVISI

- a. Pengorganisasian
- b. Komunikasi Kebijakan
- c. Monitoring Kebijakan

- a. Efektivitas
- b. Efisiensi
- c. Dampak dan Kemanfaatan
- d. Kesesuaian Nilai

<https://www.slideshare.net/triwidodowutomo/peran-tik-dalam-penyusunan-evidencebased-policy-di-era-vuca>